

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan program Sarjana (S1)
pada Program Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

FITRI JUMI RAHAYU

NIM 12030114120031

FAKULTAS EKONOMIKA & BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

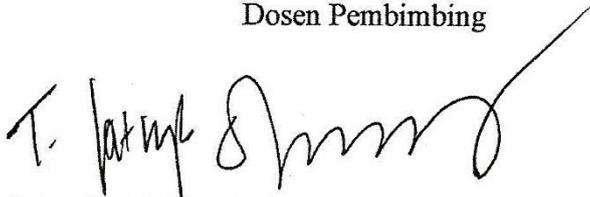
2018

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Fitri Jumi Rahayu
Nomor Induk Mahasiswa : 12030114120031
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP KECURANGAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH.**
Dosen Pembimbing : Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E, M.si, Akt, Ph.D

Semarang, 2 Mei 2018

Dosen Pembimbing



(Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E., M.Si., Akt., Ph.D)

NIP. 19711026 200003 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Fitri Jumi Rahayu
Nomor Induk Mahasiswa : 12030114120031
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP KECURANGAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH.**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 16 Juli 2018

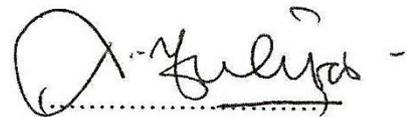
Tim Penguji

1. Tri Jatmiko Wahyu P., S.E., M.Si., Akt., Ph.D



(.....)

2. Agung Juliarto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D



(.....)

3. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt.



(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Fitri Jumi Rahayu, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 2 Mei 2018

Yang membuat pernyataan

(Fitri Jumi Rahayu)

NIM: 12030114120031

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap tingkat kecurangan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari beberapa unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kecurangan laporan keuangan merupakan salah saji yang timbul dari kecurangan yang terdapat dalam pelaporan keuangan termasuk salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah dalam laporan keuangan untuk menipu pemakai laporan keuangan dan salah saji yang diakibatkan oleh perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada 86 pegawai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kota Semarang khususnya yang bekerja dibagian akuntansi atau keuangan, dari total 86 kuesioner sebanyak 72 kuesioner kembali dan 64 kuesioner dapat diolah. Terdapat 5 hipotesis yang diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan maupun parsial lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah (lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan) maka akan menyebabkan menurunnya tingkat kecurangan.

Kata Kunci : Sistem pengendalian intern, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan kecurangan, laporan keuangan pemerintah daerah.

ABSTRACT

This study aims to examine empirically the influence of government internal control system to the level of fraud on the financial statements of local government. The government's internal control system consists of several elements, that are control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. fraudulent financial statements are misstatements arising from fraud contained in financial reporting including misstatements or deliberate deletion of amounts in the financial statements to deceive the users of financial statements and misstatements resulting from undue treatment of assets.

Data were collected using questionnaire survey. The questionnaires were delivered to 72 employes of local government unit (SKPD) Semarang Regency specifically at financial/accounting departement. A total of 86 questionnaires 72 were returned and 64 can be proccesed. There are five hypotheses that were tested by using multiple regression analysis.

The results of this study show that environment, risk assessment, control activities, information and communication and monitoring have significant negative effect on the level of fraud in the local government financial statements. This means that the better the government's internal control system (control environment, risk assessment, controlling activities, information and communication, monitoring) will lead to a decrease in the rate of fraud.

Keyword: internal control system, control environment, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring fraud, financial statement of local government.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Teruslah berbuat baik meski itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang
sedangkan pahalanya Insya Allah akan terus ada.

Ust. Hanan Attaki, Lc.,

Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.

Q.S Ar-Rum: 60

Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas, selalu ingin
tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru dan dalam
waktu yang lama.

Ali Bin Abi Thalib

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu tersayang

Kakak tercinta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil"alamin, segala puji hanya milik Allah SWT. Berkat limpahan Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP TINGKAT KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH” dengan baik dan lancar.

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika & Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari, tanpa bimbingan, bantuan dan doa dari beberapa pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan berjasa dalam proses penelitian dan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu ucapan terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada :

1. Orang tua tersayang Bapak (Alm. Paridin) dan Ibu (Sukinah), yang senantiasa mendidik, mendoakan, memberi dukungan dan semangat setiap waktu. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
2. Tri Jatmiko Wahyu Prabowo SE., M.si., Ak., Ph.D, selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan dan memberi saran yang sangat bermanfaat bagi penulis.
3. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro,
4. Fuad, S.E.T., M.Si., Ph.D., selaku Kepala Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Drs. Agustinus Santoso Adiwibowo M.Si., Akt., selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan dan saran selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika da Bisnis Univesritas Diponegoro.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, yang telah bersedia mengajar dan berbagi ilmu selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
7. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang senantiasa membantu penulis dalam segala hal.
8. Kakak tercinta (Teguh Waluyo dan Siti Nafi'ah) yang selalu mendoakan dan mendukung setiap langkah yang dilakukan oleh penulis.
9. Kakek, Nenek, dan seluruh keluarga besar yang telah mendoakan dan memberi semangat kepada penulis selama ini.
10. Teman sekaligus sahabat terbaik (Dewi, Riska, Suryati, Ningdyah, Santi) yang selalu ada dalam segala keadaan, selalu menghibur dan memberi semangat kepada penulis.
11. Teman, sahabat sekaligus kakak, Lubabul 'Amieq yang senantiasa membantu, mendoakan dan menemani penulis dalam segala keadaan.
12. Teman-teman KKN Desa Purwogondo (Emil, Lanang, Fathur, Jheni, Kak Tania dan Nanda) yang selalu menghibur dan menjadi teman se-atap yang menyenangkan dan mengesankan selama 42 hari. See you on top gengs.
13. Penghuni Kos Pak Budi (Mbak Efil, Mbak Etik, Mbak Cem) yang selalu mau mendengarkan keluh kesah penulis dan memberi semangat serta saran bagi penulis.
14. Erna Sulistyawati, teman SMP, SMA, dan teman sekamar, yang masih setia dan selalu mendoakan, mendukung dan membantu penulis dalam segala hal sampai saat ini.
15. Ulnafiah dan Nindya Putri sahabat SMA yang selalu memotivasi, menemani dan mendoakan yang terbaik bagi penulis.
16. Yustika Rakhma, adik, teman, sekaligus sahabat yang senantiasa mendukung dan membantu penulis sampai saat ini.
17. Keluarga besar panitia KKL Akuntansi Undip 2014 yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk menambah pengalaman organisasi.

18. Panitia Dash 2017 (Ajik, Oby) yang memberi kesempatan bagi penulis untuk menjadi bagian dari event tersebut.
19. Keluarga besar Akuntansi Undip angkatan 2014 atas kekompakan, keseruan dan kekeluargaan selama 8 semester ini.
20. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk dapat menghasilkan karya yang lebih baik dikemudian hari. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 2 Mei 2018

Penulis

Fitri Jumi Rahayu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TELAAH PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	15
2.1.1 Teori Tindakan Beralasan (<i>Theory of Reasoned Action</i>).....	15
2.1.2 Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>).....	16
2.1.3 Pengendalian Internal	20
2.1.4 <i>Fraud</i> atau Kecurangan	25
2.1.5 Kecurangan Laporan keuangan	29
2.1.6 Pemerintah Daerah.....	31
2.2 Penelitian Terdahulu.....	31
2.3 Kerangka Pemikiran	35
2.4 Hipotesis	38

2.4.1. Hubungan Lingkungan Pengendalian terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	38
2.4.2 Hubungan Penilaian Resiko dengan Kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	41
2.4.3 Hubungan Kegiatan Pengendalian dengan Kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	43
2.4.4 Hubungan Informasi dan Komunikasi dengan Kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	46
2.4.5 Hubungan Pemantauan dengan Kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
3.1 Variabel Penelitian	51
3.1.1 Klasifikasi Variabel	51
3.1.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	51
3.2 Populasi dan Sampel.....	58
3.3 Jenis dan Sumber Data	58
3.4 Metode Pengumpulan Data	59
3.5 Metode Analisis Data	59
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	59
3.5.2 Uji Kompetensi Data	59
3.5.2.1 Uji Validitas.....	59
3.5.2.2 Uji Reliabilitas	60
3.5.3. Uji Asumsi Klasik.....	60
3.5.3.1 Uji Multikolinieritas	60
3.3.5.2 Uji Heteroskedastisitas	60
3.3.5.3 Uji Normalitas.....	61
3.5.4 Analisis Regresi Berganda.....	61
3.5.5 Pengujian Hipotesis	62
3.5.5.1 Koefisien determinasi	62
3.5.5.2 Uji signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	62
3.5.5.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t).....	63
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	64
4.1 Objek Penelitian	64

4.2 Hasil Analisis Data	67
4.2.1 Statistik Deskriptif	67
4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data	72
4.2.2.1 Hasil Uji Reliabilitas	72
4.2.2.2 Hasil Uji Validitas	73
4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	76
4.2.3.1 Hasil Uji Multikolinearitas	76
4.2.3.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	76
4.2.3.3 Hasil Uji Normalitas	77
4.3 Uji Hipotesis	78
4.3.1 Koefesien Determinasi (R^2)	78
4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	79
4.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	80
4.4 Intepretasi Hasil Uji Hipotesis	82
4.4.1 Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	82
4.4.2 Pengaruh Penilaian Resiko Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	84
4.4.3. Pengaruh Kegiatan Pengendalian Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	86
4.4.4. Pengaruh Informasi dan Komunikasi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	88
4.4.5. Pengaruh Pemantauan Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	90
BAB V PENUTUP	93
5.1 Simpulan	93
5.2 Keterbatasan	94
5.3 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Permasalahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.....	6
Tabel 1. 2 Permasalahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.....	7
Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3. 1 Pengukuran Lingkungan Pengendalian.....	52
Tabel 3. 2 Pengukuran Penilaian Resiko.....	53
Tabel 3. 3 Pengukuran Kegiatan Pengendalian.....	54
Tabel 3. 4 Pengukuran Informasi dan Komunikasi.....	55
Tabel 3. 5 Pengukuran Pemantauan	56
Tabel 3. 6 Pengukuran Kecurangan Laporan Keuangan.....	57
Tabel 4.1 Rincian Jumlah Kuesioner.....	65
Tabel 4.2 Rincian Responden Penelitian	66
Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	68
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Kecurangan	69
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Lingkungan Pengendalian	69
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Penilaian Resiko	70
Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Kegiatan Pengendalian	70
Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Informasi & Komunikasi	70
Tabel 4.10 Statistik Deskriptif Pemantauan	70
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas	73
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Kecurangan.....	74
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Lingkungan Pengendalian.....	74
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Penilaian Resiko	74
Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas Kegiatan Pengendalian.....	75
Tabel 4.16 Hasil Uji Validitas Informasi & Komunikasi	75
Tabel 4.17 Hasil Uji Validitas pemantauan.....	75
Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolinieritas.....	76
Tabel 4.19 Hasil Uji Heteroskedastisitas	77
Tabel 4.20 Hasil Uji Normalitas.....	78
Tabel 4.21 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	78
Tabel 4.22 Hasil Uji signifikansi Simultan	79
Tabel 4.23 Hasil Uji Parameter Individual	80
Tabel 4.24 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis.....	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Theory Planned Behavior	17
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	37

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A : Kuesioner Penelitian.....	101
Lampiran B : Hasil Output SPSS.....	107
Lampiran C : Data Responden.....	120
Lampiran D : Surat Ijin Penelitian.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini akuntabilitas menjadi salah satu hal penting yang harus dijalankan oleh entitas sektor publik. Terkait dengan organisasi pemerintah, akuntabilitas publik merupakan pengungkapan informasi dan *disclosure* kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah (Mardiasmo, 2009). Di Indonesia akuntabilitas pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu pertama, akuntabilitas kinerja yang menurut Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan program yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Kedua, akuntabilitas keuangan yang merupakan wujud dari pertanggungjawaban berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik (Khalid, 2010).

Akuntabilitas menurut AAA (*American Accounting Association*) (dalam Sadjirto, 2000) jika dilihat dari perspektif fungsional merupakan tingkatan dengan 5 tahap yang berbeda yaitu pertama berkaitan dengan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana sesuai dengan yang telah disetujui dan peraturan yang berlaku (*Porbity and Legality Accountability*), kedua berkaitan dengan proses, prosedur atau ukuran-ukuran yang digunakan pada

pelaksanaan kegiatan yang ditentukan (*Process Accountability*), pada tahap ketiga penilaian tingkat efisiensi dari kegiatan yang telah dilakukan (*Performance Accountability*), tahap keempat lebih mengacu pada penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (*Program Accountability*), pada tahap terakhir atau tahap kelima yaitu pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*Policy Accountability*).

Di Indonesia masing-masing pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mewujudkan akuntabilitas keuangan dengan cara menyusun laporan keuangan pemerintah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP pasal 24 dan 25. Laporan keuangan pemerintah daerah dijadikan sarana untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, posisi keuangan, serta menentukan ketaatan instansi terhadap peraturan undang-undang. Jika dikaitkan dengan perspektif fungsional maka penyusunan laporan keuangan merupakan akuntabilitas pada tahap *probity and legality accountability* (Sadjiarto, 2000). Untuk dapat memenuhi kebutuhan para pengguna, maka informasi-informasi yang termuat dalam laporan keuangan harus bermanfaat dan berkualitas (Budiawan dan Purnomo, 2014). Dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berisi ketentuan-ketentuan akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terdapat empat karakteristik agar laporan keuangan

berkualitas. Keempat karakteristik tersebut yaitu (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (3) dapat dipahami. Untuk memenuhi karakteristik tersebut maka penyusunan laporan keuangan harus terbebas dari *fraud* atau kecurangan. Kecurangan merupakan tindakan sengaja menggunakan hak orang lain demi kepentingan pribadi. Menurut Arens (2008) kecurangan adalah setiap usaha penipuan yang dilakukan secara sengaja bermaksud untuk memperoleh harta atau hak orang lain. Kaitannya dengan audit laporan keuangan, kecurangan diartikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja (Kurniawan, 2013).

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SA seksi 316 menjelaskan bahwa kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang menimbulkan kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau menghilangkan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu pemakai laporan keuangan dan salah saji yang ditimbulkan karena perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (pencurian aktiva) entitas yang mengakibatkan laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan yang mengandung unsur kecurangan apabila digunakan pihak pengguna sebagai bahan pertimbangan maka akan menyebabkan salah dalam pengambilan keputusan (Respati, 2011). Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* terdapat tiga bentuk kecurangan (*Fraud Tree*) yaitu *corruption* (Korupsi), *asset misappropriation* (Pengambilan asset secara ilegal) dan *fraudulent statement* (Pernyataan palsu atau salah pernyataan).

Tindakan korupsi merupakan bentuk kecurangan yang biasanya terjadi dibidang perbankan maupun pelayanan publik (Wilopo, 2006). Di Indonesia, korupsi diindikasikan dengan bangkrutnya beberapa bank, dilaporkannya manajemen BUMN dan swasta ke pengadilan, rekayasa pajak, korupsi pada KPU dan DPRD (Herman, 2013). Menurut *transparency International* (2016), Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2016 berada diperingkat ke-90 (dari 176 negara), dengan skor 37 (0 sangat korup, 100 sangat bersih), dengan kata lain kondisi indonesia masih darurat korupsi ditingkat global.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*) pada bulan april-juni menunjukkan bahwa terdapat beberapa sektor yang dianggap ter-korup yaitu meliputi pendaftaran CPNS 56%, Polisi 50%, pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah 48%, pengadilan 45%, implementasi anggaran oleh pemerintah 44%. Di Indonesia sendiri pelaku korupsi beranekaragam mulai dari menteri, kepala daerah, aparat penegak hukum, anggota dewan maupun pelaku usaha. Dalam kurun waktu 6 bulan mulai januari sampai juni 2017 *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat terdapat 226 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 587 orang yang merugikan negara sebesar Rp 1,83 triliun dan nilai suap Rp 118,1 miliar.

Berkaitan dengan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK yang selanjutnya dijelaskan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2017 ditemukan beberapa kecurangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Salah satunya yaitu terjadi di Pemerintah Kabupaten Bintan dimana pengeluaran belanja barang dan jasa pada Sekretariat Daerah dan belanja bahan

bakar minyak yang tercatat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai dengan pengeluaran riil sebesar Rp 3, 66 M. Kasus lain yaitu terjadi Pemerintah Kabupaten Tegal yaitu pengelolaan dana bantuan hibah tidak sesuai dengan ketentuan, bantuan hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama digunakan untuk pembayaran gaji pegawai. Salah satu penyebab kecurangan sering terjadi pada suatu entitas yaitu dikarenakan tidak adanya pengendalian intern atau lemahnya pelaksanaan pengendalian intern pada instansi tersebut atau dengan kata lain tidak efektifnya sistem pengendalian intern (Amrizal, 2004). Hal ini terjadi karena keadaan tersebut dijadikan kesempatan oleh pelaku untuk melakukan tindak kecurangan, karena dalam keadaan tersebut kecurangan akan sulit diketahui. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa sistem pengendalian yang tidak efektif disebabkan beberapa kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern itu sendiri.

Kelemahan atas sistem pengendalian intern tersebut dikelompokkan menjadi 3 hal meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang berkaitan dengan kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yaitu berkaitan penerimaan dan penyetoran negara/daerah/perusahaan dan pelaksanaan program atau kegiatan, serta kelemahan struktur pengendalian intern, yang berkaitan dengan ada atau tidaknya serta efektif atau tidaknya sistem pengendalian intern pada suatu entitas. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 2017 hasil pemeriksaan BPK terdapat 2.156 permasalahan

berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.657 permasalahan berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja, dan 1.240 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Pada tabel-tabel dibawah ini akan dijelaskan beberapa permasalahan yang timbul akibat kelemahan pengendalian intern di beberapa instansi pemerintah daerah beserta contohnya.

Tabel 1. 1
Permasalahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

	Permasalahan dan contohnya	Jumlah permasalahan	Jumlah entitas
1.	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan		
a.	Proses penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	941	418 pemda
b.	Pencatatan belum dilakukan atau pencatatan tidak akurat	813	421 pemda
c.	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	351	241 pemda
d.	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya	51	42 pemda

Sumber: IHPS 2017

Pada tabel 1.1 telah disajikan kelemahan sistem pengendalian intern yang pertama yaitu kelemahan pada sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang menyebabkan beberapa permasalahan diantaranya proses penyusunan laporan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang terjadi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mana hasil pendataan aset dari belanja modal BOS (Bantuan Operasional Sekolah) oleh bidang persekolahan tingkat SD hingga SMK berbeda dengan realisasi belanja modal dana BOS,

selain itu rekonsiliasi yang dibuat juga belum memadai, sehingga aset tetap yang bersumber dari CSR (*Corporate Social Responsibility*) atas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak belum diklasifikasikan dalam akun aset tetap sesuai dengan jenisnya. Permasalahan yang lainnya yaitu berkaitan dengan sistem informasi dan pelaporan yang kurang memadai sehingga menyebabkan terjadinya *double posting* pada aplikasi, pencatatan ganda pada suatu transaksi, pengungkapan angsuran piutang yang belum sepenuhnya dan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan.

Tabel 1. 2
Permasalahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

2.	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	Jumlah permasalahan	Jumlah entitas
a.	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	744	380 pemda
b.	Perencanaan kegiatan tidak memadai	694	405 pemda
c.	Pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	409	255 pemda

Sumber: IHPS 2017

Pada tabel 1.2 disebutkan tentang jenis kelemahan sistem pengendalian intern yang kedua yaitu berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang menyebabkan beberapa permasalahan diantaranya penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku seperti yang terjadi di pemerintah kota Sawahlunto yang menggunakan dana kas daerah yang berasal dari pemerintah pusat untuk kegiatan rutin pemerintah kota Sawahlunto, yang mana seharusnya dana tersebut ditujukan untuk pelaksanaan tugas pembantuan. Permasalahan yang kedua yaitu berkaitan dengan kegiatan proses perencanaan yang tidak

memadai sehingga menyebabkan penganggaran belanja kurang tepat serta kegiatan yang direncanakan tidak sesuai dengan kebutuhan seperti yang terjadi di pemerintah kabupaten Mojokerto. Permasalahan lain yang terjadi yaitu kebijakan penurunan tarif pajak yang tidak berdasarkan pertimbangan yang memadai, pengelolaan piutang pajak tak tertagih kurang optimal dan lain sebagainya.

Dari penjelasan dan data diatas dapat dilihat bahwa masih banyak kecurangan yang terjadi selama proses penyusunan laporan keuangan sehingga diperlukan tindakan untuk tujuan pencegahan. Pencegahan kecurangan merupakan aktivitas yang dijalankan manajemen terkait dengan penentuan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu memberikan keyakinan bahwa pihak-pihak dalam entitas telah bertindak semestinya sehingga dapat mencapai tujuan entitas. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya kecurangan yaitu penentuan struktur pengendalian intern yang berkualitas, agar tujuan yang telah ditetapkan oleh *top manajemen* dapat tercapai, aset perusahaan dapat terjamin keamanannya serta kegiatan operasional dapat berjalan dengan efektif dan efisien (Amrizal, 2004). Kurniawan (2013) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengendalikan kecurangan yaitu dengan membangun sistem pengendalian. Tujuan dari pengendalian tersebut yaitu sebagai pertahanan pertama untuk melawan kecurangan yang terdapat dalam organisasi. Selain itu tujuan pembentukan sistem pengendalian intern untuk memonitor sistem kendali untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan.

Di lingkungan pemerintah terdapat sistem pengendalian internal yang disebut dengan SPIP atau sistem pengendalian intern pemerintah. SPIP diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 dengan 61 pasal didalamnya. Pada Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 khususnya pada pasal 3 dijelaskan bahwa SPIP terdiri dari beberapa unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal. Unsur-unsur tersebut dijadikan pedoman dan tolok ukur dalam menilai efektif atau tidaknya sistem pengendalian intern yang telah diterapkan (Herawati, 2014).

1.2 Rumusan Masalah

Tujuan penyusunan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna internal maupun eksternal. Kegunaan informasi yang terdapat pada laporan keuangan tersebut ditentukan oleh karakteristik tertentu dan informasi harus disiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan pedoman yang berlaku (Jorge and Nogueira, 2014). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 disebutkan karakteristik kualitatif yang perlu diwujudkan untuk memenuhi kualitas laporan keuangan meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Karena kualitas informasi keuangan sangat penting dalam menentukan kegunaannya, maka laporan keuangan yang disajikan harus terbebas dari kecurangan. Menurut Arens (2008) kecurangan merupakan setiap usaha penipuan yang dilakukan secara sengaja bermaksud untuk memperoleh harta atau hak orang lain. Kecurangan merupakan tindakan yang tidak dilakukan

secara terbuka dan tidak terdapat korban yang cepat menyadari bahwa kecurangan telah terjadi atau kecurangan dapat dikatakan sebagai kejahatan yang tersembunyi (Herman, 2013). Menurut William (dalam Kurniawan, 2013) kecurangan dalam laporan keuangan meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut yaitu pertama, manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang dijadikan sumber penyusunan laporan keuangan. Kedua, representasi yang salah atau penghapusan secara sengaja peristiwa atau transaksi atau informasi signifikan yang terdapat dalam laporan keuangan. Ketiga, salah penerapan yang disengaja atas prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2017 menunjukkan masih terdapat kecurangan dalam proses penyusunan laporan keuangan yang terjadi di beberapa pemerintah daerah. Seperti yang terjadi di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang mana penyajian nilai persediaan dan aset tetap tanah sebesar nol. Kasus lain terjadi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dimana terdapat *double posting* atas pemungutan dan penyetoran retribusi Daerah dan kasus lainnya yang masih terjadi di beberapa Pemerintah daerah di Indonesia. Menurut hasil pemeriksaan BPK yang dituangkan dalam IHPS I 2017 Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern.

Berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, pengendalian intern meliputi kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan catatan keuangan, memberikan keyakinan memadai atas keamanan aset yang berdampak material

pada laporan keuangan dan bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan SAP (Mulyani and Suryawati, 2013). Pengendalian intern dapat diartikan sebagai cara untuk mengarahkan, menilai dan memonitor sumber daya yang terdapat dalam organisasi dan pendeteksian serta pencegahan *fraud* (Untary, 2012). Berkaitan dengan sistem pengendalian laporan keuangan merupakan suatu proses yang dibuat dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan data yang disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut Pernyataan Standar Auditing seksi 319, pengendalian internal adalah “proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personel lainnya yang dirancang guna memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”. Pengendalian internal yang berkualitas seharusnya menghasilkan informasi keuangan yang lebih andal. Pengendalian internal bertujuan untuk mencegah dan atau mendeteksi kesalahan atau kecurangan yang dapat terjadi dalam salah saji laporan keuangan (Doyle *et.al*, 2007). Menurut Arens (2008) SPI merupakan sebuah sistem pengendalian yang didalamnya terdapat prosedur dan proses yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada manajemen bahwa organisasi dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Penerapan sistem pengendalian intern yang cukup dan efektif dapat memperkecil kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan yang dapat merugikan organisasi (Herman, 2013).

Penerapan SPI berfungsi pertama, untuk pencegahan kesalahan baik berupa kekeliruan atau ketidakberesan (*Preventive*). Kedua, mendeteksi kesalahan, kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi (*Detective*). Ketiga, memperbaiki kesalahan, kelemahan dan penyimpangan yang terdeteksi (*Corrective*). Keempat, mengarahkan agar aktivitas dilakukan dengan tepat dan benar (*Directive*). Kelima, menetralkan kelemahan pada aspek *control* yang lain (*Compensative*) (Herman, 2013). Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik sebuah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempengaruhi tingkat kecurangan pada laporan keuangan pemerintah daerah ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efek sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kecurangan pada laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui efek lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap kecurangan pada laporan keuangan pemerintah daerah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kecurangan pada laporan keuangan.
2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar alasan mengapa suatu instansi khususnya instansi pemerintah dalam hal ini

adalah pemerintah daerah perlu komitmen yang kuat dalam pengimplementasian sistem pengendalian intern.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini terdapat 5 bab dengan sistematika penulisan tersebut:

a. BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini berisi latar belakang yang mendasari munculnya permasalahan dan perlunya diadakan penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika penulisan.

b. BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bagian telaah pustaka ini akan dijelaskan tentang teori yang dijadikan dasar dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang terdapat dalam penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana penelitian dilaksanakan. Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan sampel, jenis dan sumber, metode pengumpulan dan metode analisis data.

d. BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan diuraikan tentang obyek penelitian, analisis dan interpretasi hasil dari analisis data yang telah dilakukan.

e. BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran yang diberikan untuk penelitian mendatang.